



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas petunjuk dan karunia-NYA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2023.

Laporan AKuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LKIP) ini merupakan bahan evaluasi bagi pimpinan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan Badan sesuai dengan visi, misi, program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami sadar karena keterbatasan kemampuan dalam penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka banyak kekurangannya, maka kami mohon saran perbaikan dan masukan dalam penyusunan LKIP di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Majalengka, 27 Maret 2024

Mengetahui :	
Sekretaris	
Bidang Kesatuan Bangsa	
Bidang Poldagri dan Ormas	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAJALENGKA



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660822 198903 1 005

3

2

KATA PENGANTAR

3

DAFTAR ISI

4

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN

10

**BAB II PERENCANAAN
KINERJA**

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023

14

**BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA**

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN

31

BAB IV PENUTUP

33

LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2023, Rencana Kerja (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

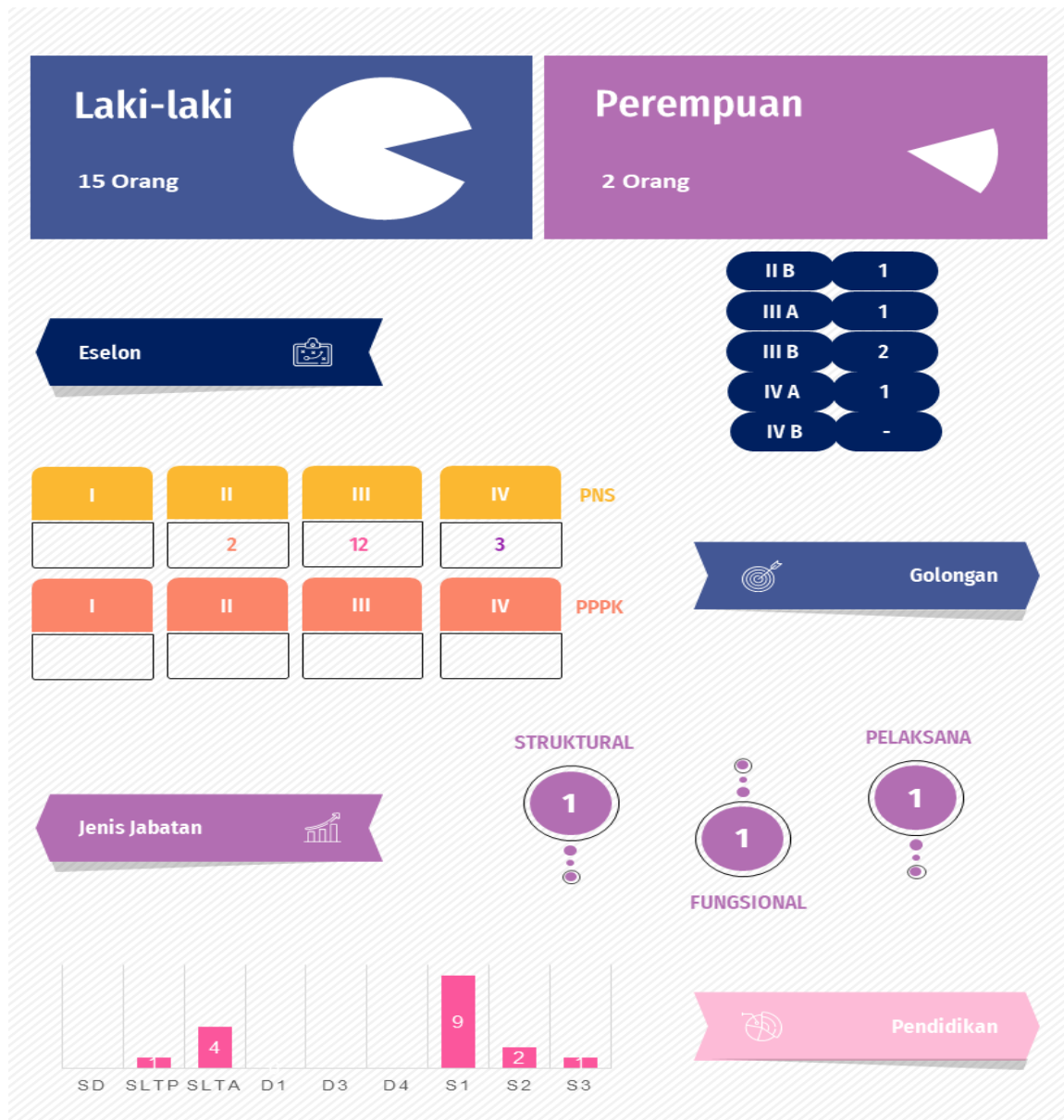
A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Kedudukan

Berdasarkan perbup 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan di Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, brkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:



C. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, telaah visi- misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2023 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Pemahaman Ideologi, nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin pudar; Tidak bisa di pungkiri bahwa dengan semakin majunya teknologi saat ini membuat masyarakat kurang menerapkan nilai nilai pancasila yang luhur dan melemahnya wawasan kebangsaan masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air semakin kurang, jelas ini adalah isu strategis yang akan menjadi acuan kita dalam meningkatkan lagi pemahaman dan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai Badan yang memiliki tugas dalam hal ini.
2. Potensi Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi, serta munculnya ekses ekses negatif dengan munculnya modus modus kejahatan yang baru dengan memanfaatkan tekhnologi canggih dan maraknya kasus kerusakan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional
3. Pendidikan Politik masyarakat yang masih rendah; Pendidikan politik yang masih renda dapat di lihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada serta masih maraknya konflik konflik yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilukada.
4. Krisis kepercayaan kepada pemerintah; Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan kurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat

dalam menangkal berbagai konflik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan

5. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang mulai memudar
Menurunnya harmonisasi kehidupan masyarakat dikarenakan meningkatnya individualisme masyarakat dengan majunya teknologi dan maraknya konflik dan kekerasan komunal di tengah masyarakat saat ini.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2023 adalah :

1. Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI.
2. Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal mengancam keutuhan NKRI.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu tahun 2020 – 2023, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kewaspadaan masyarakat menuju Kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat.
2. Terwujudnya sinergitas kemitraan dengan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat serta Partai Politik.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Indikator	Satuan	Target		
		2021	2022	2023
Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Persen	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	(%)
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 29.000.000	0.06 %
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp. 42.786.803..000	89.62%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.114.400.000	2.33%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.271.910.000	0.57 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	83.925.000	0.18 %
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.448.550.976	7.24 %
Jumlah	Rp. 47.734.588.976	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

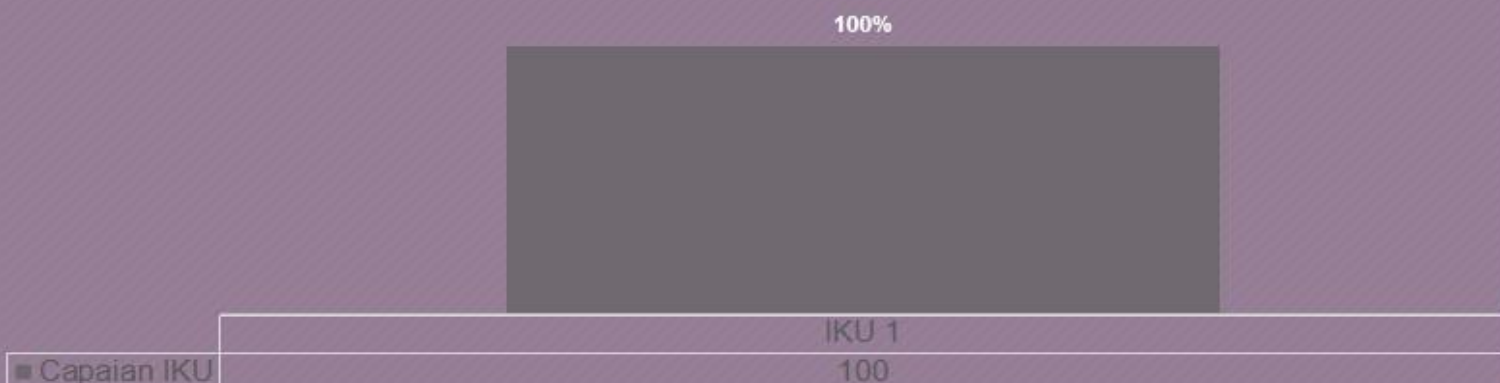
Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

a. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Target dengan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100%	100%	100%

Sasaran Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa tercapai sesuai target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

b. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	PENINGKATAN/PENURUNAN REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	-

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa pada indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Tahun 2023 tetap. Begitu pun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya seperti yang tertuang pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATAN/PENURUNAN REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	100%

c. Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja 2023 Dengan Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	100%

Jika dibandingkan dengan target akhir pada renstra sudah sesuai dan mencapai target 100%.

d. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Rata - rata Provinsi

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Provinsi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA PROVINSI 2023	PENINGKATAN / PENURUNAN
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA PROVINSI 2023	PENINGKATAN / PENURUNAN
	Kesatuan Bangsa				

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi karena indikator yang digunakan berbeda.

e. FAKTOR - FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1. Meningkatnya Kesadaran tentang Kebebasan, Kesetaraan dan Lembaga Demokrasi

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Untuk mengupayakan hal tersebut, Badan Kesatuan



Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Membina generasi muda dalam pendidikan politik
Kegiatan ini diberikan kepada mahasiswa di beberapa Universitas di Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2023 pembinaan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali bertempat di Universitas Majalengka dan Universitas YIPB Majalengka. Pendidikan politik juga diberikan kepada ibu-ibu PKK Kabupaten Majalengka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka mengundang Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dari Akademisi. Pembinaan pendidikan politik ini penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam pemilihan umum.

b) Menyalurkan bantuan keuangan hibah tahunan
Setiap tahunnya Pemkab Majalengka menyalurkan bantuan dana hibah bagi sejumlah partai politik (Parpol) yang memiliki kursi sebagai wakil rakyat untuk kepentingan partai, dana hibah tersebut ditujukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bantuan dana hibah kepada parpol tersebut nantinya digunakan untuk



meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Dana hibah itu terdapat tiga bagian

fungisinya, untuk pendidikan politik, kesekretariatan dan operasional. Namun, Parpol harus menggunakan 60 persen dari dana tersebut untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Pemberian dana tersebut, berdasarkan PP No.5/2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Sesuai PP tersebut Pemkab Majalengka memberikan bantuan kepada parpol yang memiliki wakil di DPRD Majalengka berupa dana hibah dari APBD daerah. Jumlah bantuan kepada setiap parpol berbeda-beda, ditentukan berdasarkan suara yang diperoleh partai politik itu sendiri pada saat pemilu tahun 2019 lalu. Setidaknya ada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Majalengka periode 2019-2024, PDIP 15 kursi, Gerindra 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKS 5 kursi, PKB 5 kursi dan PAN 5 Kursi. Selanjutnya, Nasdem 3 kursi, PPP 2 kursi, Demokrat 2 kursi. Parpol tersebut akan menerima bantuan sebesar Rp 3.000 untuk satu suara yang diperoleh pada pemilu, Terdapat 672.271 suara yang diperoleh oleh 9 parpol tersebut, dan total dana bantuan yang akan diberikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.016.813.000, Bertempat di Pendopo Majalengka.

2. Meningkatnya Pengamalan Masyarakat tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan



Negara Indonesia adalah negara bangsa yang dibangun atas

dasar keanekaragaman suku-suku bangsa. Dalam kondisi Keanekaragaman suku bangsa, bangsa Indonesia telah bertekad untuk hidup dalam tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia, dengan dasar semboyan Bhineka Tunggal Ika. Guna mewujudkan dan memantapkan paham kesatuan atas dasar perbedaan, diperlukan pola wawasan kebangsaan Indonesia yang utuh.

Maka dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan:

a) Membina generasi muda dalam penguatan karakter kepemimpinan berwawasan bela negara

Pada Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan Wawasan Kebangsaan *Goes to School* untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia dan memahami empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Pada Tahun 2023 kegiatan ini dilaksanakan di di SMAN 1 Jatiwangi.

Selain itu, untuk meningkatkan pengamalan ideologi dan wawasan kebangsaan juga telah dibentuk



Kampung
Pancasila di
Desa Trajaya
Kecamatan
Pasalah,
Kabupaten
Majalengka.
Pembentukan

Kampung Pancasila ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor dan pertimbangan yang muncul dalam konteks perkembangan zaman, pengaruh globalisasi, serta kebutuhan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang latar belakang terbentuknya Kampung Pancasila:

1. Ketimpangan Nilai Pancasila

Dalam perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila mengalami ketimpangan dalam masyarakat. Ketimpangan ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup nasional.

2. Pengaruh Globalisasi

Pengaruh globalisasi, yang mencakup arus informasi, budaya, dan ekonomi yang lebih terbuka, dapat memengaruhi nilai-nilai tradisional dan identitas nasional. Globalisasi memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa, tetapi juga dapat membawa ancaman terhadap kelestarian nilai-nilai dan identitas budaya.

3. Mengatasi Ancaman terhadap Identitas Bangsa Indonesia

Terdapat kekhawatiran tentang kemungkinan tergerusnya identitas bangsa Indonesia akibat pengaruh globalisasi yang kuat. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai landasan ideologi negara yang dapat mempertahankan dan memperkuat identitas bangsa.

4. Kampung Pancasila sebagai Solusi

Untuk mengatasi ketimpangan nilai Pancasila dan ancaman terhadap identitas bangsa, inisiatif Kampung Pancasila di Desa Trajaya dan daerah serupa diresmikan. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.



Dengan demikian, terbentuknya Kampung Pancasila merupakan respons

terhadap perubahan zaman, pengaruh globalisasi, dan kebutuhan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup nasional. Ini adalah upaya untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pada tanggal 19 Desember 2023 diperingati sebagai Hari Bela Negara ke-75. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Dalam rangka memperingati



Hari Bela Negara setiap 19 Desember, masyarakat dapat mengikuti

pedoman pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara (PKBN). Implementasi kesadaran bela negara tersebut dapat dilakukan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Berikut ini nilai dasar atau unsur dasar pelaksanaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, yaitu: Cinta tanah air, Sadar berbangsa dan bernegara, Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, Rela berkorban untuk bangsa dan negara, Memiliki kemampuan awal bela negara bertempat di Makodim 0617 Majalengka.

Telah dilaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal



tersebut
diperingati
sebagai Hari
Lahir
Pancasila.
Maka dalam
Hal ini
Bakesbangpol
Majalengka

Secara Rutin Melaksanakan Hari Lahir Pancasila Pada Setiap Tanggal 1 Juni Bertempat di Pendopo Majalengka.

b) Membina pemuda kader Kabupaten yang terseleksi dan diberikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya



mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan

Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Wali Kota), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Merdeka). Anggotanya berasal dari pelajar SMA Sederajat kelas 1 atau 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus. Di Kabupaten Majalengka Sendiri terdiri dari 32 Pasukan Paskibraka 45 Pasukan TNI/Polri, Bertempat di GGM Majalengka.

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan



yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

Pada Tahun 2023 Bakesbangpol Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembinaan masyarakat dan anggota FKUB dalam pemahaman kearifan lokal, penguatan peran FKUB dan diseminasi kerawanan ketahanan yang dihadiri oleh Tim Penganut Aliran Kepercayaan (Pakem) yang terdiri dari Anggota TNI, Polri, Kejasaaan, Tokoh Agama dan Kepala Daerah (Bupati). Dalam Setiap Triwulan atau 3 Bulan Sekali Melakukan Rapat Hasil Pemantauan dilapangan Bertempat di Aula Kejaksaan Kabupaten Majalengka.

4. Meningkatnya Kemandirian dan Keberdayaan Ormas

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



Organisasi
Kemasyarakatan
yang terdaftar di
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Majalengka yaitu
sebanyak 115



Ormas. Maka dari itu kami melakukan pembinaan ke setiap Sekretariat Ormas sekaligus mensosialisasikan Peraturan Ormas, selain itu Bakesbangpol Kabupaten Majalengka juga mengadakan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Setiap ormas mengirimkan ketua, sekretaris dan bendahara mengikuti kegiatan pemberdayaan ormas yang diadakan di Hotel Fitra Kabupaten Majalengka.

5. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Kewaspadaan Daerah

Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial yang muncul di lingkungannya membutuhkan perhatian dan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi masalah secara cepat. Hal ini dapat membantu dalam



melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan masalah sosial yang mungkin muncul di masyarakat.

Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebuah forum yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman masyarakat atau ancaman lainnya, serta mengevaluasi kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Pembentukan FKDM sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan ancaman keamanan di wilayahnya.

Untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan FKDM di Kabupaten Majalengka, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya FKDM, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi anggota FKDM, serta membentuk program *reward* bagi anggota FKDM yang aktif dan berprestasi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam memfasilitasi akses dan



penggunaan sumber daya yang dibutuhkan oleh FKDM, seperti peralatan, transportasi,

dan anggaran. FKDM di Kabupaten Majalengka sudah terbentuk sampai tingkat Kecamatan 8 orang FKDM Kabupaten dan 3 orang FKDM setiap kecamatan.

Tim Kewaspadaan Dini bertugas merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan

Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah, mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional dan memberikan rekomendasi

kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan



Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah. Tim Wasdin Kabupaten Majalengka sebanyak 47 Orang Terdiri Dari Pemda Majalengka, Polres Majalengka, Kodim 0617 Majalengka, Lanud S. Sukani, Kejaksaan Negeri Majalengka, Deninteldam Kodam III Siliwangi, Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88.

f. PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA

No	Program	Anggaran	Pengampu
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp1.114.400.000	Bidang Kesatuan Bangsa
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp83.925.000	Bidang Kesatuan Bangsa
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Rp271.910.000	Bidang Kesatuan

	Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Bangsa
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp29.000.000	Bidang Poldagri dan Ormas
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	RP42.786.803.000	Bidang Poldagri dan Ormas
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.448.550.976	Sekretariat

g. EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa yaitu sebesar 43,99% atau Rp21.001.965.330,00 dari pagu anggaran Rp47.742.589.976,00 dengan realisasi Rp26.740.624.646,00.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kestuan Bangsa	100%	56,01%



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 telah mencapai target 100%. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,99% atau Rp21.001.965.330,00.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak baik bagi masyarakat.



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua, *[Signature]*

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023



Pihak Pertama, *[Signature]*

Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19660822 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.448.550.976,00	APBD
2.	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 1.114.400.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 42.786.803.000,00	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 29.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp 83.925.000,00	APBD
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 271.910.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 47.734.588.976,00	



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Dr. H. NERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19660822 198903 1 005

Majalengka, November 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Bukti sebar LKIP

